

ABSTRAK

Belanja daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah masih memiliki kualitas yang rendah, hanya 30 persen dari APBD yang berdampak langsung kepada masyarakat. Belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja operasional yang umumnya kurang produktif, sedangkan belanja modal paling sedikit dibandingkan belanja lainnya, padahal penggunaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Realisasi belanja modal pada Provinsi Jawa Tengah masih di bawah 30 persen, belum mencapai target sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari PAD, DAU, DAK, DBH, dan PDRB terhadap Belanja Modal pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan periode penelitian dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan DBH berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap belanja modal, DAU dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, sedangkan PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021.

Implikasi dari penelitian ini adalah Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan penggalan sumberdaya yang memberikan kontribusi terhadap PAD dan DBH. Pemerintah Daerah lebih meningkatkan anggaran DAU dan DAK yang dialokasikan ke anggaran belanja modal untuk meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah daerah dapat meminimalisir belanja rutin yang tidak perlu, lebih banyak dialokasikan pada belanja modal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong peningkatan ekonomi dan kemandirian masyarakat secara berkelanjutan.

Kata kunci : Belanja Daerah, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Produk Domesik Regional Bruto.

ABSTRACT

Regional expenditure carried out by the Regional Government is still of low quality, only 30 percent of the APBD has a direct impact on the public. Regional expenditure is used more for operational expenditure which is generally less productive, while capital expenditure is the least compared to other expenditure, even though their use can be felt directly by the public. The realization of capital expenditure in Central Java Province is still below 30 percent, it has not yet reached the target according to the direction of the Ministry of Home Affairs.

The purpose of this study is to analyze the effect of PAD, DAU, DAK, DBH, and PDRB on capital expenditure in 35 regencies/cities in Central Java Province. This study uses secondary data sourced from Badan Pusat Statistik and Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan with a research period from 2017 to 2021. The data analysis technique in this study uses panel data regression analysis.

The results of this study indicate that PAD and DBH have a positive and insignificant effect on capital expenditure, DAU and DAK have a positive and significant effect on capital expenditure, while PDRB has a negative and significant effect on capital expenditure in 35 regencies/cities in Central Java Province in 2017-2021 .

The implication of this research is that Regional Government must optimize the extraction of resources that contribute to PAD and DBH. The Regional Government further increase the DAU and DAK budgets allocated to the capital expenditure budget to improve public service. Regional Government can minimize unnecessary routine expenditure, more allocated to capital expenditure in order to improve people's welfare and encourage economic development and community self-sufficiency in a sustainable manner.

Keywords: Regional Expenditure, Capital Expenditure, Regional Original Income, Balance Funds, and Gross Regional Domestic Product.